



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**Daftar Identifikasi
Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Diprakarsai Oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
dan Tahun Pengundangan**

**JAKARTA
2011**

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Diprakersai Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2011

NO.	REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A. KEPUTUSAN/PERATURAN PRESIDEN				
1.	Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011	Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	Ketenagalistrikan	Mencabut Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PI' Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157)
2.	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tanggal 20 Juni 2011	Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air	Geologi	
3.	Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan Batubara	Ketenagalistrikan	
4.	Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	Ketenagalistrikan	

NO.	REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
		dan Bahan bakar gas		
5.	Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 13 September 2011	Penetapan Cekungan Air Tanah	Geologi	
B.	PERATURAN MENTERI			
1.	01 Tahun 2011 7 Januari 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4	Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas Pantai Minyak dan Gas Bumi	Migas	
2.	02 Tahun 2011 16 Februari 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73	Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
3.	03 Tahun 2011 18 Februari 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 77	Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam Rangka Pendidikan dan Pelatihan, Dan Pengelolaan Fasilitas <i>Lube Oil Blending Plant</i> Dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan	Migas	
4.	04 Tahun 2011 24 Februari 2011 Berita Negara Republik Indonesia	Penghargaan Energi	Penunjang	

NO.	REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
	Tahun 2011 Nomor 90			
5.	Peraturan Bersama MESDM dan Mendagri 05 Tahun 2011 8 April 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223	Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup <i>Liquified Petroleum Gas</i> Tertentu di Daerah	Migas	
6.	06 Tahun 2011 19 April 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227	Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast	Energi	
7.	07 Tahun 2011 11 Mei 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 287	Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional	Penunjang	
8.	08 Tahun 2011 13 Mei 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 290	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Listrik Perdesaan Tahun Anggaran 2011	Ketenagalistrikan	
9.	09 Tahun 2011 13 Mei 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 291	Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	Ketenagalistrikan	Mencabut: 1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2038 K/40/MEM/2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Biaya Penyambungan Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; 2) Keputusan Menteri Energi dan

NO.	REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
				<p>Sumber Daya Mineral Nomor 1616 K/36/MEM/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; dan</p> <p>3) Peraturan Menteri Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. Permen No. 9 Th 2011 dicabut oleh Permen ESDM No. 33 Tahun 2014</p>
10.	10 Tahun 2011 3 Agustus 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 467	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan	Ketenagalistrikan	
11.	11 Tahun 2011 3 Agustus 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 468	Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
12.	12 Tahun 2011 11 Agustus 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487	Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara	Minerba	

NO.	REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
13.	13 Tahun 2011 11 Agustus 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 488	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
14.	14 Tahun 2011 11 Agustus 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 565	Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011	Penunjang	
15.	15 Tahun 2011 9 September 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 566	Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempabumi, dan Tsunami	Geologi	
16.	16 Tahun 2011 1 November 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 685	Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak	Migas	Dirubah dengan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1065)
17.	17 Tahun 2011 21 Desember 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 863	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
18.	18 Tahun 2011 21 Desember 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 864	Jadwal Retensi Arsip Substantif Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	

NO.	REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
19.	19 Tahun 2011 28 Desember 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 921	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan tanggal 28 Agustus 2001
20.	20 Tahun 2011 28 Desember 2011 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 922	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan tanggal 31 Juli 2002

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Dipraktekkan Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2010

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A.	PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110	Wilayah Pertambangan	Minerba	
2.	Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111	Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Minerba	Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282)
3.	Nomor 55 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Minerba	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
4.	Nomor 70 Tahun 2010 tanggal 20 Oktober 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi	Energi	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 132, Tambahkan Lembaran Negara Nomor 4777)
5.	Nomor 78 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172	Reklamasi dan Pasca Tambang	Minerba	
6.	Nomor 79 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173	Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Migas	
B.	PERATURAN PRESIDEN			
1.	Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010	Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
2.	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
3.	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tanggal 5 Mei 2010	Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional	Penunjang	
C.	PERATURAN MENTERI			
1.	01 Tahun 2010 22 Januari 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22	Pedoman Pengawasan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
2.	02 Tahun 2010 27 Januari 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41	Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait
3.	03 Tahun 2010 27 Januari 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42	Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri	Migas	
4.	04 Tahun 2010 28 Januari 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43	Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
5.	05 Tahun 2010 29 Januari 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49	Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal	Penunjang	Dicabut oleh Permen ESDM No. 35 Tahun 2014 dan Permen ESDM No. 23 Tahun 2015
6.	06 Tahun 2010 2 Februari 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58	Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi	Migas	
7.	07 Tahun 2010 30 Juni 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 314	Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Nomor 291)
8.	08 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 321	Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
9.	09 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 322	Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pebangkitan Energi Baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
10.	10 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 323	Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu, serta Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan	Ketenagalistrikan	
11.	11 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 324	Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Perawatan dan perbaikan Mesin produksi dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu	Ketenagalistrikan	
12.	12 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 325	Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Pebangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan	Ketenagalistrikan	
13.	13 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 326	Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri	Energi	Dicabut oleh Permen ESDM No. 41 Th 2015

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
14.	14 Tahun 2010 5 Juli 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 327	Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan	Energi	Dicabut oleh Permen ESDM No. 41 Th 2015
15.	15 Tahun 2010 27 Agustus 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 419	Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait	Ketenagalistrikan	Diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 63)
16.	16 Tahun 2010 27 Agustus 2010	Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 47/M- IND/PER/2008, Nomor 23 Tahun 2008, Nomor Per.13/MEN/VII/2008, Nomor 35 Tahun 2008, Nomor PER- 03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada Sektor Industri di Jawa-Bali	Ketenagalistrikan	
17.	17 Tahun 2010 23 September 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463	Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara	Minerba	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
18.	18 Tahun 2010 22 November 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
19.	19 Tahun 2010 2 Februari 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599	Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunakan Untuk Transportasi	Migas	

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Dipraktekkan Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2009

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A.	UNDANG-UNDANG			
1.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959	Pertambangan Mineral dan Batubara	Minerba	Mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831
2.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 23 September 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052	Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	Mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317)
B.	PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 24 Maret 2009	Perubahan Atas PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Migas	Merubah PP No. #6 Thn 2004

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
2.	Nomor 55 Tahun 2009 tanggal 1 September 2009	Perubahan Kedua Atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Migas	Perubahan Kedua PP No. 35 Th 2004
3.	Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009	Konservasi Energi	Energi	
C.	PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN			
1.	Keputusan Presiden selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 Tanggal 22 April 2009	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	Penunjang	
	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2009, tanggal 18 Maret 2009	Pengangkatan Anggota DEN	EBTKE	
2.	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Migas	
3.	Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara	Ketenagalistrikan	Diubah dengan Perpres Nomor 47 Tahun 2011

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
D. PERATURAN MENTERI				
1.	01 Tahun 2009 12 Januari 2009	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum	Migas	Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu
2.	02 Tahun 2009 30 Januari 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11	Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi	Energi	Mencabut Permen ESDM No. 005 Tahun 2007
3.	03 Tahun 2009 6 Februari 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15	Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
4.	04 Tahun 2009 20 Februari 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 25	Aturan Distribusi Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
5.	05 Tahun 2009 24 Maret 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46	Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 427)
6.	06 Tahun 2009 28 April 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 80	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	
7.	07 Tahun 2009 28 April 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 81	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	
8.	08 Tahun 2009 28 April 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	
9.	09 Tahun 2009 28 April 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83	Pedoman Pelaksanaan Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Pencantuman Gelar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	Mencabut: 1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 582 K/70/MEM/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 2) Ketentuan Pasal 39, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 dalam

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
				Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1161 WO/MEM/2005 tanggal 4 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian Terpadu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10.	10 Tahun 2009 22 Mei 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116	Jadwal Retensi Arsip Substantif Penelitian dan Pengembangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
11.	11 Tahun 2009 25 Juni 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156	Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi	Energi	
12.	12 Tahun 2009 14 Juli 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 189	Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
13.	13 Tahun 2009 14 Juli 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190	Pedoman Penyusunan Rancangan Penetapan Cekungan Air Tanah	Geologi	
14.	14 Tahun 2009 31 Juli 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224	Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	Penunjang	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
15.	15 Tahun 2009 11 Agustus 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 248	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Perlengkapan-Kendali Lampu sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	Terdapat Perubahan Nomor HZ
16.	16 Tahun 2009 11 Agustus 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 249	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Pemutus Sirkuit Arus Sisa Tanpa Proteksi Arus Lebih Terpadu untuk Pemakaian Rumah Tangga dan Sejenisnya (RCCB) sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	Terdapat Perubahan Nomor HZ
17.	17 Tahun 2009 11 Agustus 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 250	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Luminer sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	Terdapat Perubahan Nomor HZ
18.	18 Tahun 2009 19 Agustus 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 274	Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	Minerba	
19.	19 Tahun 2009 31 Agustus 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 274	Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	Migas	
20.	20 Tahun 2009 11 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 293	Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja Dewan Energi Nasional	Penunjang	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
21.	21 Tahun 2009 11 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 294	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
22.	Nomor 22 Tahun 2009 29 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 329	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama	Migas	
23.	Nomor 23 Tahun 2009 29 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 330	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan pelatihan Teknis Bidang Mineral dan Batubara	Minerba	
24.	Nomor 24 Tahun 2009 29 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 331	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Geologi	Geologi	
25.	Nomor 25 Tahun 2009 29 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 332	Penetapan dan pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	Ketenagalistrikan	
26.	Nomor 26 Tahun 2009 29 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333	Penyediaan dan Pendistribusian <i>Liquified Petroleum Gas</i>	Migas	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
27.	Nomor 27 Tahun 2009 29 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 334	Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur	Penunjang	
28.	28 Tahun 2009 30 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341	Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara	Minerba	Diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2012 (9 Oktober 2012 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 989)
29.	29 Tahun 2009 30 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 342	Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah	Migas	
30.	30 Tahun 2009 30 September 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 343	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
31.	31 Tahun 2009 13 November 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 427	Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi terbarukan Skala Kecil dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128)

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
32.	32 Tahun 2009 4 Desember 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 475	Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73)
33.	33 Tahun 2009 28 Desember 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 522	Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010	Penunjang	
34.	34 Tahun 2009 31 Desember 2009 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 546	Pengutamakan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri	Minerba	

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Dipraktekkan Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2008

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A.	PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008	Air Tanah	Geologi	
B.	PERATURAN PRESIDEN/KEPUTUSAN PRESIDEN			
1.	Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008	Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional	Penunjang	
2.	Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2008 27 September 2008	Hari Jadi Pertambangan dan Energi	Penunjang	
3.	Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2008	Pengesahan memorandum of understanding on the ASEAN power grid (memorandum saling pengertian mengenai jaringan transmisi tenaga Listrik ASEAN)	Ketenagalistrikan	
C.	PERATURAN MENTERI			
1.	01 Tahun 2008 5 Februari 2008	Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua	Migas	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
2.	02 Tahun 2008 5 Februari 2008	Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama	Migas	
3.	03 Tahun 2008 5 Februari 2008	Pedoman dan Tata Cara Pengambilan Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama	Migas	
4.	04 Tahun 2008 29 Februari 2008	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	
5.	05 Tahun 2008 29 Februari 2008	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Ketenagalistrikan	
6.	06 Tahun 2008 17 Maret 2008	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
7.	07 Tahun 2008 17 Maret 2008	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
8.	08 Tahun 2008 17 Maret 2008	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan	Ketenagalistrikan	
9.	09 Tahun 2008 17 Maret 2008	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
10.	10 Tahun 2008 31 Maret 2008	Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak tanah Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil	Migas	
11.	11 Tahun 2008 18 April 2008	Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi	EBTKE	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
12.	12 Tahun 2008 21 April 2008	Perubahan Hari dan Jam Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Akamigas, Badan Pendidikan dan pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badiklat ESM), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
13.	13 Tahun 2008 13 April 2008	Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/MEM/2002 tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	
14.	14 Tahun 2008 9 Mei 2008	Harga Patokan Penjualan Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	EBTKE	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46)
15.	15 Tahun 2008 16 Mei 2008	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Transportasi Cairan Untuk Hidrokarbon dan Standar Nasional Indonesia Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan distribusi Gas Sebagai Standar Wajib	Migas	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
16.	16 Tahun 2008 23 Mei 2008	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum	Migas	
17.	17 Tahun 2008 23 Mei 2008	Panitia dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional Dari Pemangku Kepentingan	EBTKE	
18.	18 Tahun 2008 29 Mei 2008	Reklamasi dan Penutupan Tambang	Minerba	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang
19.	19 Tahun 2008 13 Juni 2008	Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Migas	
20.	20 Tahun 2008 13 Juni 2008	Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib	Migas	
21.	21 Tahun 2008 30 Juni 2008	Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi	Migas	
22.	22 Tahun 2008 30 Juni 2008	Jenis-Jenis Biaya Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Yang Tidak Bisa Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama	Migas	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Ketentuan Perpajakan dan Biaya Operasi yang Tidak Dapat Dikembalikan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
23.	47/M-IND/PER/7/2008, 23 Tahun 2008, Per.13/Men/VII/2008, 35 Tahun 2008, PER-03/MBU/2008 14 Juli 2008	Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri di Jawa Bali	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2010
24.	24 Tahun 2008			
25.	25 Tahun 2008 5 Agustus 2008	Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional	Minerba	
26.	26 Tahun 2008 14 Agustus 2008	Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dalam suatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1186)
27.	27 Tahun 2008 22 Agustus 2008	Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi	Migas	
28.	28 Tahun 2008 22 Agustus 2008	Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram	Migas	
29.	29 Tahun 2008 18 September 2008	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
30.	30 Tahun 2008 18 September 2008	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik, Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
31.	31 Tahun 2008 18 September 2008	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
32.	32 Tahun 2008 26 September 2008	Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain	EBTKE	
33.	33 Tahun 2008 1 Oktober 2008	Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Pelayanan Listrik Nasional Batam	Ketenagalistrikan	
34.	35 Tahun 2008 12 November 2008	Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	Ketenagalistrikan	
35.	36 Tahun 2008 12 November 2008	Pengusahaan Gas Metana Batubara	Minerba	
36.	37 Tahun 2008 27 November 2008	Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
37.	38 Tahun 2008 28 November 2008	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum	Migas	
38.	39 Tahun 2008 3 Desember 2008	Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib	Minerba	
39.	41 Tahun 2008 November 2008	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium, dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi, dan Pelayanan Umum	Migas	
40.	42 Tahun 2008 12 Desember 2008	Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun 2009	Penunjang	

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Diprakersai Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2007

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A.	UNDANG-UNDANG			
1.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tanggal 26 April 2007	Penanggulangan Bencana		
2.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tanggal 10 Agustus 2007	Energi	Energi	
B.	PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tanggal 5 November 2007	Kegiatan Usaha Panas Bumi	Panas Bumi	
C.	PERATURAN PRESIDEN			
1.	Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007	Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi	Penunjang	Dicabut Perpres No. 94 Th 2015
2.	Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2007 Tanggal 19 September 2007	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Pembangkit tenaga	Ketenagalistrikan	Mengubah Pepres Nomor 86 Tahun 2006

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
		Listrik Yang Menggunakan Batubara		
3.	Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 November 2007	Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Tabung 3 Kilogram	Migas	
D.	PERATURAN MENTERI			
1.	01 Tahun 2007 8 Januari 2007	Penetapan dan pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
2.	02 Tahun 2007 8 Januari 2007	Penetapan dan pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
3.	03 Tahun 2007 29 Januari 2007	Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
4.	004 Tahun 2007 11 Mei 2007	Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	Ketenagalistrikan	
5.	005 Tahun 2007 12 Juli 2007	Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi	Panas Bumi	Dicabut dengan Permen ESDM No. 02 Tahun 2009
6.	006 Tahun 2007 26 Juli 2007	Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	Minerba	
7.	007 Tahun 2007 31 Juli 2007	Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Migas	
8.	008 Tahun 2007 3 Agustus 2007	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000/Amd1-2006 Mengenai Amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000), Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	Mencabut Kepmen ESDM No. 2046 K/40/MEM/2001

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
9.	009 Tahun 2007 3 Agustus 2007	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 dan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002/Amd1-2006 Mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Pemutus Sirkuit Untuk Operasi Arus Bolak-Balik, Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	
10.	010 Tahun 2007 3 Agustus 2007	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2006 Mengenai Saklar Untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1: Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	
11.	011 Tahun 2007 3 Agustus 2007	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2006 Mengenai Peranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya – Keselamatan – Bagian 2-80 : Persyaratan Khusus Untuk Kipas Angin, Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
12.	012 Tahun 2007 3 Agustus 2007	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892.1-2006 Mengenai Tusuk-Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	
13.	014 Tahun 2007 19 September 2007	Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
14.	015 Tahun 2007 19 September 2007	Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	
15.	016 Tahun 2007 19 September 2007	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Pengatur Hilir Migas	Migas	
16.	017 Tahun 2007 24 September 2007	Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
17.	018 Tahun 2007 11 Oktober 2007	Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
18.	019 Tahun 2007 24 Oktober 2007	Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
19.	020 Tahun 2007 21 November 2007	Pedoman Tugas Relajar Pendidikan Pascasarjana Program Magister/Master (S2) dan Doctor (S3) Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
20.	021 Tahun 2007 19 Desember 2007	Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Tabung LPG 3 Kg	Migas	

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Diprakersai Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2006

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A.	PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tanggal 30 Januari 2006	Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Migas	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 5 Juli 2006	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	Perubahan Kedua PP No. 10 Thn 1989 (Dicabut dengan PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik)
B.	PERATURAN PRESIDEN			
1.	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 25 Januari 2006	Kebijakan Energi Nasional	Energi	Dicabut dengan PP No. 79 Tahun 2014
2.	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tanggal 11 April 2006	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	Migas	Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumn Pengguna Jenis BBM Tertentu

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
3.	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006	Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara	Ketenagalistrikan	Diubah dengan Perpres 59 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009
4.	Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2006 tanggal 5 Juli 2006	Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Perpres 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan Perpres 72 Tahun 2006
	Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006	Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Pembangkit tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara		Diubah dengan Perpres Nomor 91 Tahun 2007
5.	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 8 September 2006	Tim Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo	Migas	
C.	PERATURAN MENTERI			
1.	001 Tahun 2006 tanggal 02-01-2006	Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum	Ketenagalistrikan	
2.	002 Tahun 2006 tanggal 18-01-2006	Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah	Ketenagalistrikan	
3.	026 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006	Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional	Migas	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
4.	027 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006	Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Yang Diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi Migas	Migas	
5.	028 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006	Pedoman dan Tata cara Pelaksanaan Survei Umum Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Migas	
6.	029 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
7.	030 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Ketenagalistrikan	
8.	031 Tahun 2006 tanggal 08-05-2006	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Bidang Jasa Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Listrik Sub Bidang Instruktur Operasi	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
		Pembangkit dan Sub Bidang Instruktur Pemeliharaan Pembangkit		
9.	033 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006	Pengusahaan Gas Metana Batubara	Migas	
10.	034 Tahun 2006 tanggal 02 Juni 2006	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
11.	035 Tahun 2006 tanggal 02 Juni 2006	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi	Ketenagalistrikan	
12.	037 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006	Tata Cara Pengajuan Rencana Impor dan Penyelesaian Barang Yang Dipergunakan Untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Migas	
13.	040 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006	Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Migas	Migas	
14.	044 Tahun 2006 tanggal 18 Juli 2006	Pembelian Tenaga Listrik Dalam Rangka Percepatan Diversifikasi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Ke Batubara Melalui Pemilihan Langsung	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 46)

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
15.	045 Tahun 2006 tanggal 20 Juli 2006	Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi	Migas	
16.	046 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006	Perubahan Atas Permen ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	
17.	047 Tahun 2006 tanggal 11 September 2006	Pedoman Pembuatan dan Pemanfaatan Briket Batubara dan Bahan Bakar Padat Berbasis Batubara	Minerba	
18.	048 Tahun 2006 tanggal 29 Agustus 2006	Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Permen ESDM No. 36 Tahun 2013
19.	049 Tahun 2006 tanggal 4 Oktober 2006	Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan Pejabat di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
20.	050 Tahun 2006 tanggal 4 Oktober 2006	Petunjuk Pelaksanaan Upacara Bendera di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
21.	051 Tahun 2006 tanggal 3 Oktober 2006	Persyaratan dan Pedoman Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain	EBTKE	Dicabut dengan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain
22.	053 Tahun 2006 tanggal 6 November 2006	Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan di Dalam Negeri	Migas	

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Dipraktekkan Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2005

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A.	PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 17 Januari 2005	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan PP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tanggal 10 September 2005	Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Migas	Merubah PP No. 35 Th 2004
B.	PERATURAN PRESIDEN			
1.	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 28 Februari 2005	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	Migas	- Dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri - Mencabut Keppres No. 90 Thn 2002
2.	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tanggal 30 September 2005	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	Migas	Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012
3.	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005	Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak	Migas	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
	tanggal 16 November 2005			
C.	PERATURAN MENTERI			
1.	0021.K/20/MEM/2005 tanggal 18 Januari 2005	Pedoman dan Pola Tetap Kebijakan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional 2005-2020	Migas	
2.	0398.K/40/MEM/2005 tanggal 25 Februari 2005	Penetapan Kawasan Karst Sukolilo	Geologi	
3.	0009 Tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005	Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
4.	0001 Tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005	Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Dalam Keadaan Bertegangan	Ketenagalistrikan	
5.	1109.K/MEM/2005 tanggal 21 Maret 2005	Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Konsumen Tegangan Rendah	Ketenagalistrikan	
6.	1135.K/81/MEM/2005 tanggal 28 Maret 2005	Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi	Migas	
7.	3 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005	Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi	Penunjang	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
8.	0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005	Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Migas	
9.	0008 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005	Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal	Migas	
10.	0010 Tahun 2005 tanggal 25 April 2005	Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional	Ketenagalistrikan	
11.	1213.K/31/MEM/2005 tanggal 25 April 2005	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional	Ketenagalistrikan	Mencabut Kepmen ESDM No. 0954 K/30/MEM/2004
12.	1321.K/20/MEM/2005 tanggal 30 Mei 2005	Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional	Migas	
13.	1352.K/81/MEM/2005 tanggal 3 Juni 2005	Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135.K/81/MEM/2005 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penetapan Bagian Daerah penghasil Minyak Bumi serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2005	Penunjang	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
14.	1393.K/30/MEM/2005 tanggal 10 Juni 2005	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	
15.	1395.K/30/MEM/2005 tanggal 13 Juni 2005	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	
16.	1397.K/20/MEM/2005 tanggal 14 Juni 2005	Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi Nasional 2005-2020	Migas	
17.	0027 Tahun 2005 tanggal 14 Juli 2005	Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan	Ketenagalistrikan	
18.	0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005	Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral		Sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552)
19.	0031 Tahun 2005 tanggal 22 Juli 2005	Tata Cara Penghematan Energi	Energi	Sudah dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 556)

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
20.	0034 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1: Pemutus Sirkuit Untuk Operasi Arus Bolak Balik, Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	
21.	0035 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6507.1-2002 Mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1: Pemutus Sirkuit Untuk Operasi Arus Bolak Balik, Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	
22.	0036 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6203.1-2001 Mengenai Saklar Untuk Instalasi Listrik Tetap Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1: Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	
23.	0037 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80-2003(2) Mengenai Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan Bagian 2-80: Persyaratan Khusus Untuk Kipas Angin, Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
24.	0038 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292-1-2003 Mengenai Piranti Listrik Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan Bagian 1: Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	
25.	0039 Tahun 2005 tanggal 15 September 2005	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-3892-1-2001 Mengenai Tusuk Kontak dan Kotak Kontak Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Sejenisnya-Keselamatan Bagian 1: Persyaratan Umum, Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	
26.	0040 Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2005	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Inspeksi, dan Sub Bidang Pemeliharaan	Ketenagalistrikan	
27.	0041 Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2005	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Penunjang, Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan, dan Sub Bidang Koordinasi	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
28.	0042 Tahun 2005 tanggal 6 Oktober 2005	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu, Sub Bidang Penunjang, dan Sub Bidang Perawatan dan perbaikan Mesin Produksi	Ketenagalistrikan	
28.	1952 K/20/MEM/2005 tanggal 17 Oktober 2005	Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Untuk Memberikan Rekomendasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Untuk Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi	Penunjang	
29.	2043 K/20/MEM/2005 tanggal 21 November 2005	Penugasan PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Di Seluruh Wilayah Indonesia	Migas	
30.	0044 Tahun 2005 tanggal 22 November 2005	Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu	Migas	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
31.	0045 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005	Instalasi Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	Mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 P/40/M.PE/1990 tanggal 16 Juni 1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 437 K/30/MEM/2003 tanggal 11 April 2003 Diubah dengan Permen Nomor 046 Tahun 2006
32.	0046 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005	Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Permen ESDM Nomor 33 Tahun 2008

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Dipraktekkan Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2004

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A.	PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2009	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara	Migas	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2009	Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Migas	Diubah oleh PP No. 34 Tahun 2005 dan kedua diubah oleh PP No. 55 Tahun 2009
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tanggal 14 Oktober 2004	Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Migas	
B.	KEPUTUSAN PRESIDEN			
1.	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 Tanggal 12 Mei 2004	Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan Yang Berada di Kawasan Hutan	Minerba	
2.	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 18 Mei 2009	Pembubaran Tim Koordinasi Penanggulangan Tanpa Izin, Penyalagunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan serta Pencurian Aliran	Penunjang	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
		Listrik		
C.	PERATURAN MENTERI			
1.	0002 Tahun 2004 tanggal 2 Januari 2004	Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Pengembangan Energi Hijau)	Energi	
2.	0057 K/40/MEM/2004 tanggal 16 Februari 2004	Perubahan Keputusan Mentei Pertambangan dan Energi Nomor 680 K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	Minerba	
3.	0075 K/30/MEM/2004 tanggal 24 Februari 2004	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Sub Bidang Perencanaan dan Konstruksi serta Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
4.	0954 K/30/MEM/2004 tanggal 15 April 2004	Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Kepemen ESDM No. 1213.K/31/MEM/2005

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
5.	0980 K/40/MEM/2004 tanggal 4 Mei 2004	Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Untuk Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Perusahaan Sumber Daya Panas Bumi Yang Ada Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003	Panas Bumi	
6.	0983 K/16/MEM/2004 tanggal 6 Mei 2004	Kebijakan Energi Nasional	Energi	
7.	1059 K/70/MEM/2004 tanggal 26 Mei 2004	Standar Latih Pendidikan dan Pelatihan Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil	Penunjang	
8.	1128 K/40/MEM/2004 tanggal 23 Juni 2004	Kebijakan Batubara Nasional	Minerba	
9.	1149 K/34/MEM/2004 tanggal 26 Juni 2004	Keanggotaan Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2311 tahun 2008
10.	1150 K/34/MEM/2004 tanggal 28 Juni 2004	Aturan Jaringan Tenaga Listrik Jawa-Madura-Bali	Ketenagalistrikan	
11.	1185 Tahun 2004 tanggal 16 Juli 2004	Pelayanan Jasa Bidang Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
12.	1480 Tahun 2004 tanggal 9 Agustus 2004	Tata Cara Penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	Migas	Dicabut dengan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
13.	1522 K/80/MEM/2004 tanggal 25 Agustus 2004	Perubahan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 356 K/80/MEM/2004 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2004	Migas	
14.	1610 K/02/MEM/2004 tanggal 18 Oktober 2004	Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	Dicabut dengan Keputusan Menteri Nomor 1762K/07/MEM/2007 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral
15.	1614 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004	Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing	Minerba	
16.	1659 K/40/2004 tanggal 1 Desember 2004	Penetapan Kawasan Kars Gunung Semeru dan Pacitan Timur	Geologi	
17.	1707 K/30/MEM/2004 tanggal 13 Desember 2004	Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
18.	1708 K/30/MEM/2004 tanggal 13 Desember 2004	Penetapan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi dan Sub Bidang Pemeliharaan	Ketenagalistrikan	

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Diprakersai Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2003

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A.	UNDANG-UNDANG			
1.	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tanggal 22 Oktober 2003	Panas Bumi	Panas Bumi	Dicabut dengan UU No. 21 Tahun 2014
B.	PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 6 Maret 2003	Perubahan Peruntukan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998	Minerba	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003	Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)	Migas	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003	Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	Dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	Ketenagalistrikan	Tidak berlaku secara hukum sesuai hasil putusan Mahkamah Konstitusi
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2003 tanggal 1 Desember 2003	Penjualan Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara	Migas	
C.	KEPUTUSAN PRESIDEN			
1.	Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 23 Januari 2003	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama Dalam Bidang-Bidang Energi dan Sumber-Sumber Mineral	Penunjang	
2.	Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2003 tanggal 30 September 2003	Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	Ketenagalistrikan	Diubah dengan Keppres 76 Tahun 2003
3.	Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003	Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
D.	PERATURAN MENTERI			
1.	05 K/30/MEM/2003 tanggal 8 Januari 2003	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 mengenai Frekuensi Standar Khusus Untuk Frekuensi Sistem Arus Bolak Balik Fase Tunggal dan Fase Tiga 50 Hertz Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0034 Tahun 2005 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-1922-2002 Mengenai Pemutus Sirkuit Untuk Proteksi Arus Lebih Pada Instalasi Rumah Tangga dan Sejenisnya-Bagian 1: Pemutus Sirkuit Untuk Operasi Arus Bolak Balik, Sebagai Standar Wajib
2.	Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Keuangan Nomor 31 K/20/MEM/2003 31 K/KMK.01/2003 tanggal 20 Januari 2003	Pedoman Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri Oleh Pertamina	Migas	
3.	111 K/70/MEM/2003 tanggal 14 Februari 2003	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetisi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi Sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Migas	
4.	207 K/30/MEM/2003 tanggal 7 Maret 2003	Pemberlakuan Standar nasional Indonesia 19-6659-2002 Mengenai Tanda Keselamatan - Pemanfaatan Listrik Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	
5.	437 K/30/MEM/2003 tanggal 11 April 2003	Perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/40/M.PE/1990 tentang Instalasi Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
6.	517 K/81/MEM/2003 tanggal 14 April 2003	Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2003	Migas	
7.	716 K/40/MEM/2003 tanggal 28 April 2003	Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura	Air Tanah	
8.	812 K/30/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003	Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Untuk Pemrosesan dan Pelaksanaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	Minerba	
9.	813 K/30/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003	Pedoman dan Pola Tetap Pengembangan Industri Ketenagalistrikan Nasional 2003-2020	Ketenagalistrikan	
10.	815 K/30/MEM/2003 tanggal 23 Mei 2003	Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika	Ketenagalistrikan	
11.	865 K/30/MEM/2003 tanggal 9 Juni 2003	Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
12.	901 K/30/MEM/2003 tanggal 30 Juni 2003	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 04-6292.2.80/2003 Mengenai Piranti Listrik Untuk Rumah dan Sejenisnya-Keselamatan, Bagian 2 – 80 Mengenai Persyaratan Khusus Untuk Kipas Angin Sebagai Standar Wajib	Ketenagalistrikan	
13.	953 K/50/MEM/2003 tanggal 17 Juli 2003	Kriteria Pembangunan Berkelanjutan Untuk Proyek <i>Clean Development Mechanism</i> (CDM) Sektor Energi	Energi	
14.	961 K/40/MEM/2003 tanggal 23 Juli 2003	Penetapan Kawasan Kars Gomobong Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah	Geologi	
15.	988 K/80/MEM/2003 tanggal 1 Agustus 2003	Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
16.	1018 K/30/MEM/2003 tanggal 15 Agustus 2003	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
17.	1065 Tahun 2003 tanggal 10 September 2003	Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Migas	Diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992)
18.	1086 K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003	Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan	Geologi	
19.	1088 K/20/MEM/2003 tanggal 17 September 2003	Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Migas	
20.	1094 K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003	Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan, dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	Migas	
21.	1095 K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003	Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	
22.	1313 K/30/MEM/2003 tanggal 28 Oktober 2003	Penetapan dan pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
23.	1334 K/29/MEM/2003 tanggal 31 Oktober 2003	Penunjukan PT Pertamina (Persero) Sebagai Pengelola Sementara Pengoperasian Lapangan Wailawi	Migas	
24.	1601 K/11/MEM/2003 tanggal 23 Desember 2003	Pengelolaan Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah	Penunjang	
25.	1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003	Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan	Minerba	
26.	1616 K/36/MEM/2003 tanggal 31 Desember 2003	Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 291)

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Diprakerjakan Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2002

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A.	PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 6 Mei 2002	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Gas Negara	Migas	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Migas	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002	Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Migas	
B.	KEPUTUSAN PRESIDEN			
1.	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 16 Januari 2002	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	Migas	
2.	Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002	Penanguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara	Penunjang	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
3.	Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	Migas	
4.	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tanggal 23 Mei 2002	Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut	Minerba	
5.	Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2002 tanggal 12 Agustus 2002	Pokok-Pokok Organisasi Pertamina	Migas	
6.	Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002	Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Migas	
7.	Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002	Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara	Ketenagalistrikan	
8.	Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002	Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	Migas	Dicabut oleh Perpres No. 22 Thn 2005
C.	KEPUTUSAN MENTERI			
9.	83 K/40/MEM/2002 tanggal 28 Januari 2002	Pencabutan Keputusan Menteri pertambangan dan Energi Nomor 2283 K/40/MPE/1997 tentang Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia	Minerba	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
10.	216 K/31/MEM/2002 tanggal 22 Maret 2002	Penetapan Status Proyek PLTP Karaha Dari Ditangguhkan Menjadi Diteruskan	Panas Bumi	
11.	414 K/81/MEM/2002 tanggal 22 April 2002	Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Minyak Bumi dan Gas Alam serta Pertambangan Umum Untuk Tahun 2002	Penunjang	
12.	667 K/11/MEM/2002 tanggal 14 Mei 2002	Penugasan Kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Dalam Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik	Geologi	
13.	832 K/45/MEM/2002 tanggal 30 Mei 2002	Pengujian Juru Ledak di Bidang Pertambangan Umum	Minerba	
14.	1121 K/24/MEM/2002 tanggal 12 Juni 2002	Pelimpahan Wewenang Pemberian Pertimbangan Tertulis Pabrikasi Pelumas, Pengolahan Pelumas Bekas, dan Pengemasan Pelumas Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	Migas	
15.	1122 K/30/MEM/2002 tanggal 12 Juni 2002	Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar	Ketenagalistrikan	Pasal 14 dicabut dengan Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2009
16.	1187 K/30/MEM/2002 tanggal 2 Juli 2002	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
17.	1188 K/30/MEM/2002 tanggal 2 Juli 2002	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi	Ketenagalistrikan	
18.	1189 K/30/MEM/2002 tanggal 2 Juli 2002	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi	Ketenagalistrikan	
19.	1273 K/30/MEM/2002 tanggal 31 Juli 2002	Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	
20.	1439 K/30/MEM/2002 tanggal 24 September 2002	Penetapan Status Proyek-Proyek Listrik Swasta Dari Semula Ditangguhkan dan Dikaji Kembali Menjadi Diteruskan.	Ketenagalistrikan	
21.	1636 K/13/MEM/2002 tanggal 22 Oktober 2002	Pengelolaan Data Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
22.	1637 K/12/MEM/2002 tanggal 22 Oktober 2002	Pembentukan Unit Pengelola Data Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
23.	1638 K/73/MEM/2002 tanggal 22 Oktober 2002	Unsur Pimpinan dan Komite Pengarah Unit Pengelola Data Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
24.	1723 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002	Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian	Penunjang	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
25.	1724 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002	Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah	Penunjang	
26.	1725 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002	Organisasi dan Tata Kerja Musium Geologi	Penunjang	

**Daftar Identifikasi Peraturan Perundang-undangan
Yang Diterbitkan/Dipraktekkan Oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Berdasarkan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dan Tahun Pengundangan**

Tahun 2001

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
A.	UNDANG-UNDANG			
1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tanggal 23 November 2001	Minyak dan Gas Bumi	Migas	Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Desember 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beberapa pasalnya yaitu Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
B.	PERATURAN PEMERINTAH			
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 26 November 2001	Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Cara Pengurusan dan Penggunaan Cadangan Umum Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)	Migas	
C.	KEPUTUSAN PRESIDEN			
1.	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 14 Februari 2001	Penyediaan dan Pelayanan Pelumas	Migas	
2.	Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001	Tim Koordinasi Pertambangan Tanpa Izin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan pencurian Aliran Listrik	Ketenagalistrikan	
3.	Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001 tanggal 29 Maret 2001	Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	Migas	
4.	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tanggal 15 Juni 2001	Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri	Migas	
5.	Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001	Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api	Penunjang	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
D. PERATURAN MENTERI				
1.	150 Tahun 2001 tanggal 2 Maret 2001	Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
2.	450 K/46/MEM/2001 tanggal 5 April 2001	Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Permen ESDM Nomor 0046 Tahun 2005
3.	Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep - 110/MEM/2001 1217 K/05/MEM/2001 tanggal 29 Mei 2001	Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang	
4.	1693 K/34/MEM/2001 tanggal 22 Juni 2001	Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas dan pengolahan Pelumas Bekas serta Penetapan Mutu Pelumas	Migas	
5.	1772 K/46/MEM/2001 tanggal 30 Juni 2001	Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disedikan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Preusan Listrik Negara	Ketenagalistrikan	
6.	1906 K/30/MEM/2001 tanggal 20 Juli 2001	Tata Cara Penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan dan Wilayah Kerja Minyak dan Gas bumi	Migas	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
7.	Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan dan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 1905 K/34/MEM/2001, 426/KMK.01/2001, 233/MPP/Kep/7/2001 tanggal 20 Juli 2001	Ketentuan Impor Pelumas	Migas	
8.	2037 K/73/MEM/2001 tanggal 23 Agustus 2001	Pencabutan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1123 K/73/MEM/2001 tentang Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pusat Departemen Pertambangan dan Energi	Minerba	
9.	2038 K/40/MEM/2001 tanggal 24 Agustus 2001	Biaya Penyambungan Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik negara	Ketenagalistrikan	Dicabut dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 291)
10.	2046 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001	Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Bidang Rekayasa Elektronika SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) sebagai Standar Wajib di Bidang Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	

NO.	NOMOR REGULASI	PENJELASAN REGULASI		KETERANGAN
		JUDUL	MATERI PENGATURAN	
1	2	3	4	5
11.	2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001	Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	Diubah dengan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2007 dan dengan Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2011
12.	2053 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001	Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Ketenagalistrikan	
13.	2057 K/09/MEM/2001 tanggal 29 Agustus 2001	Rencana Strategis Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2001-2004	Penunjang	